

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

Masalah yang paling krusial suatu bangsa atau negara yaitu mewujudkan kondisi masyarakat secara ideal. Penelusuran formula ideal dan strategi perubahan masyarakat ini dikenal dengan sebutan pembangunan nasional (Hidayat, 2022). Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Asvi, 2017).

Beritik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan, maka dari itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 7 yaitu “Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

BUMDes sebagai salah satu bagian lembaga yang dapat menompang kesejahteraan warga desa, dan tentunya bisa berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan ketahanan ekonomi desa untuk mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakatnya sehingga diperlukan kesadaran dan usaha bersama oleh semua komponen masyarakat, pemerintah desa maupun para pelaku usaha mikro, makro, dan menengah. Adanya kesadaran serta kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang timbul pada berlangsungnya kegiatan BUMDes sehingga tujuan pendiriannya dapat tercapai dengan baik (Rahmatika, 2019).

Kenyataan dilapangan, fungsi BUMDes tidak berjalan sesuai dengan regulasi dan harapan semua pihak. Masih banyak kasus BUMDes yang menjadi penghambat BUMDes untuk berkembang baik yang dilakukan secara sengaja

maupun tidak sengaja. Adapun beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes yang terjadi di Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir antara lain:

Tabel 1. 1 Penyelewengan Dana BUMDes

No.	Tahun	Pihak yang Terlibat	Besaran Penyelewengan Dana (Rp.)
1	2023	Bendahara BUMDes Desa Banjarasem, Kec. Seririt	274.000.000
2	2023	Pengurus BUMDes Mekar Laba Desa Temukus, Kec. Banjar	283.178.000
3	2022	Bendahara BUMDes Gema Matra Desa Pucaksari, Kec. Busungbiu	250.000.000
4	2022	Ketua BUMDes Amarnya, Desa Patas, Kec. Gerokgak	511.664.752
5	2021	Ketua BUMDes Sadu Amertha Desa Tirtasari, Kec. Banjar	87. 634.354

Sumber : (Data Diolah, 2024)

Disamping kasus penyelewengan tersebut, berdasarkan perolehan data dari Tim Pendamping Profesional Kabupaten Buleleng 2023. Kabupaten Buleleng mencatat masih ada 31 BUMDes yang bermasalah. Bumdes tersebut antara lain:

Tabel 1.2 Data BUMDes Bermasalah Kabupaten Buleleng

No	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan	Status Kepengurusan	Kategori BUMDes
1	BUMDes Patas	Patas	Gerokgak	Tidak Aktif	Masih dalam proses hukum
2	BUMDes Jagat Ditha	Ularan	Seririt	Kurang Aktif	Perlu penguatan SDM
3	BUMDes Lumbang Taman Sari	Bestala	Seririt	Aktif	Perlu penguatan dalam modal usaha
4	BUMDes Desa Patemon	Patemon	Seririt	Tidak Aktif	Masih dalam penanganan masalah
5	BUMDes Mandara	Kalisada	Seririt	Tidak Aktif	Masih dalam penanganan masalah
6	BUMDes Karsa	Sepang	Busungbiu	Tidak Aktif	Dalam proses penanganan

No	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan	Status Kepengurusan	Kategori BUMDes
	Sejahtera				kasus
7	BUMDes Arta Pawitra	Titab	Busungbiu	Tidak Aktif	Dalam proses penanganan kasus
8	BUMDes Padang Kerta	Kekeran	Busungbiu	Aktif	Belum maksimal
9	BUMDes Busungbiu	Busungbiu	Busungbiu	Kurang Aktif	Belum maksimal dan tidak berbadan hukum
10	BUMDes Suasti Padalyang	Umejero	Busungbiu	Aktif	Belum dikelola maksimal
11	BUMDes Tirta Amerta	Banyuatis	Banjar	Aktif	Belum dikelola maksimal
12	BUMDes Jati Amerta	Munduk	Banjar	Aktif	Belum dikelola maksimal
13	BUMDes Artha Sari Lestari	Cempaga	Banjar	Aktif	Belum dikelola maksimal
14	BUMDes Sari Sedana	Sidetapa	Banjar	Aktif	Belum dikelola maksimal
15	BUMDes Yasha Kerthi	Banjar Tegeha	Banjar	Aktif	Belum dikelola maksimal
16	BUMDes Sanjiwani	Banjar	Banjar	Kurang Aktif	Terbatasnya kapasitas SDM
17	BUMDes Bina Usaha Mandiri	Dencarik	Banjar	Aktif	Belum dikelola maksimal
18	BUMDes Mekar Laba	Temukus	Banjar	Tidak Aktif	Dalam proses hukum
19	BUMDes Karya Sedana	Tigawasa	Banjar	Tidak Aktif	Dalam proses hukum
20	BUMDes Amertha Sedhana	Ambengan	Sukasada	Aktif	Perlu penguatan kapasitas pelaku
21	BUMDes Langgeng	Padangbulia	Sukasada	Aktif	Belum dikelola maksimal

No	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan	Status Kepengurusan	Kategori BUMDes
	Lestari				
22	BUMDes Sila Skti Sejahtera	Kayuputih	Sukasada	Aktif	Belum dikelola maksimal
23	BUMDes Giri Mekar	Lemukih	Sawan	Aktif	Belum dikelola maksimal
24	BUMDes Sekarbang	Sekumpul	Sawan	Aktif	Belum dikelola maksimal
25	BUMDes Banwa Bharu	Bebetin	Sawan	Aktif	Belum dikelola maksimal
26	BUMDes Laksa Dana	Menyali	Sawan	Aktif	Belum dikelola maksimal
27	BUMDes Sari Guna Amertha	Sinabun	Sawan	Aktif	Perlu penguatas kapasitas pelaku
28	BUMDes Labdajaya	Giri Emas	Sawan	Aktif	Kurang pemahaman pengelolaan modal
29	BUMDes Tunjung Mekar	Tunjung	Kubutambahan	Aktif	Belum dikelola maksimal
30	BUMDes Valli Karya Lestari	Bengkala	Kubutambahan	Aktif	Belum dikelola maksimal
31	BUMDes Anugrah Amertha Bumi	Mangening	Kubutambahan	Aktif	Belum dikelola maksimal

Sumber : (TPP. Kab. Buleleng, 2023)

Bersumber dari data diatas, dapat diketahui bahwa 31 BUMDes masih bermasalah tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Buleleng. Sebagian besar BUMDes tersebut masuk dalam kategori BUMDes berkembang dan sebagian kecil merupakan BUMDes perintis dan pemula. Permasalahan yang dialami BUMDes tersebut beranekaragam, dimulai dari kasus kecurangan penggunaan dana BUMDes oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, kurangnya pemahaman pelaku terhadap cara pengelolaan BUMDes baik pengelolaan modal,

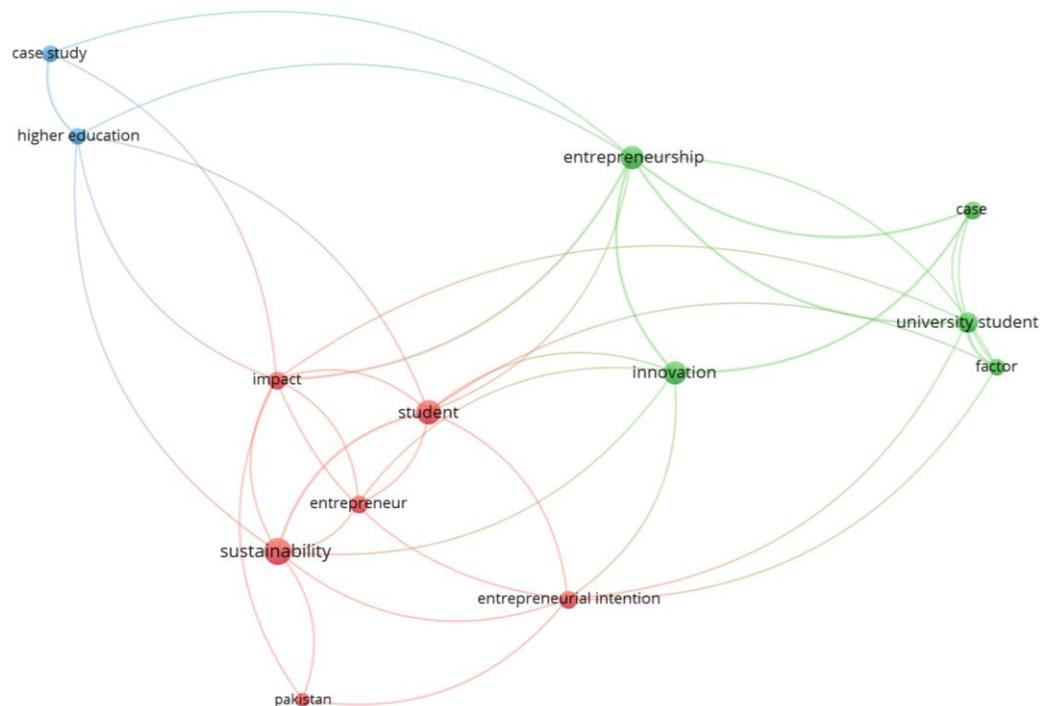
pencatatan laporan keuangan, pemasaran produk, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa serta kurangnya kesadaran dari pihak terkait terhadap pengelolaan BUMDes.

Berbagai permasalahan ini menyebabkan terganggunya keberlanjutan BUMDes. Keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi disaat perusahaan memiliki kecukupan dana untuk mejalankan dan mengembangkan usahanya. Keberlanjutan usaha selalu berkaitan dengan kebangkrutan. Pada umumnya setiap perusahaan selalu lebih memperhatikan suatu kondisi yang berpotensi merugikan perusahaan tersebut seperti kebangkrutan (Aulia, 2021). Mengingat sifat target keberlanjutan yang berubah-ubah, tantangan keberlanjutan yang buruk, dan ketidakpastian seputar proses inovasi, keberlanjutan bukanlah tujuan akhir melainkan upaya berkelanjutan, yang memerlukan kemampuan tipe transformasi (Coffay, 2022). Saat ini bukti baru muncul yang menggambarkan perilaku perusahaan telah melampaui orientasi proaktif hingga mencapai keadaan di mana keberlanjutan menjiwai seluruh organisasi (Valente, 2015).

Budaya perusahaan berperan sangat penting dalam menentukan kemampuan perusahaan untuk berhasil baik dengan inovasi model bisnis konvensional maupun berkelanjutan (Teece, 2018). Pemikiran keberlanjutan harus menembus seluruh rantai nilai perusahaan. Hal ini dimulai dari pengadaan bahan mentah dan jasa, hingga transportasi, praktik ketenagakerjaan, dan pengelolaan lingkungan dalam produksi. Hal ini mencakup pengemasan dan pengiriman, penggunaan produk dan layanan oleh pelanggan, serta pembuangan produk, penggunaan kembali, atau daur ulang (Leisinger, 2015). Meskipun perusahaan semakin menyadari perlunya menerapkan perbaikan keberlanjutan, mereka sering kali

kesulitan mencapai target keberlanjutan (Geissdoerfer, 2018). Meningkatnya persaingan menghadirkan tantangan tersendiri dalam mencapai keberlanjutan bisnis. Dalam konteks ini, kualitas layanan telah muncul sebagai elemen penting dalam meningkatkan daya saing dan menjamin keberlanjutan bisnis (Utama, 2024). Dalam mencapai keberlanjutan, Perusahaan memerlukan konvergensi antara kemampuan dinamis perusahaan dan strategi keberlanjutan mereka (Amui, 2017) dan (Bocken & Geradts, 2020).

Hasil Pembangunan dan pemisualisian jaringan *bibliometric* menggunakan aplikasi *VOSviewer* pada metadata bibliografi jurnal internasional terindeks Scopus menunjukkan hasil sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Jaringan Bibliometric

Sumber: VOSviewer (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa variable terkait keberlanjutan yang sedang menjadi focus dan banyak di sitasi pada penelitian internasional dalam lima tahun terakhir adalah kewirausahaan atau *entrepreneur*, inovasi, dan mahasiswa.

Salah satu teori yang menjelaskan factor-faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan adalah teori *New Public Management* (NPM). Teori *New Public Management* (NPM) merupakan suatu pendekatan manajemen yang berasal dari sektor swasta yang diterapkan dalam sektor publik yang difokuskan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan kinerja organisasi pemerintah (Ferlie, 2015). Beberapa prinsip dan karakteristik utama dari *New Public Management* (NPM) yang lebih rinci menurut (Pollitt & Bouckaert, 2017). adalah fokus pada hasil (*outcome*), keterbukaan dan akuntabilitas, dan manajemen berbasis hasil (*result-based management*). NPM menggunakan pendekatan manajemen berbasis hasil untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi sektor publik sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan capaian hasil yang diinginkan. Dalam manajemen berbasis hasil, penetapan tujuan berfokus pada capaian hasil yang dapat diukur dan terukur. Teori *New Public Management* telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik di beberapa negara. Beberapa aspek yang dapat meningkatkan efisiensi aktivitas Perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan adalah tetrapreneur dan pelaksanaan kemitraan perguruan tinggi.

Terdapat sembilan permasalahan yang menyebabkan BUMDes di Kabupaten Buleleng sulit berkembang (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 2018). Tujuh dari sembilan permasalahan tersebut berhubungan dengan tetrapreneur. Permasalahan pertama adalah pemahaman

perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, perlu usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Kedua, konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai prestasi karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang. Ketiga, belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Sebagian besar kepala desa dan perangkat desa hanya membuka informasi berbagai isu pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan saja sehingga banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri yang mengakibatkan banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUMDes. Keempat, banyaknya perilaku kekuasaan yang koruptif pada struktur atas, terbukti dengan banyaknya kasus korupsi pada BUMDes. Kelima banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes seperti KUD, BUUD dan berbagai program lainnya yang gagal dan tidak tentu keberadaannya, sehingga membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDes. Keenam penguasaan kemampuan

manajerial pengelola BUMDes yang kurang memadai. Ketujuh, BUMDes dipandang kurang baik bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya. Masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Ini yang membuat anak muda belum banyak berkiprah di BUMDes, akibatnya logika usaha yang dibangun sebagian besar BUMDes masih dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan kaum tua. Berbagai permasalahan yang terjadi pada BUMDes tersebut berkaitan dengan *tetrapreneur*. Sehingga berbagai permasalahan BUMDes menunjukkan diperlukan sistem kewirausahaan yang lebih baik (Fatimah, 2018).

Strategi pengembangan model *tetrapreneur* merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengelola, mengatur dan membuat strategi pengembangan BUMDes yang berdaya saing (Masterplandes.com, 2020). Strategi pengembangan model *tetrapreneur* menjadi model pengembangan yang harus difokuskan oleh BUMDes dalam meningkatkan daya saing di pasar ekonomi (Firmansyah, 2023). Beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa *tetrapreneur* digunakan untuk meningkatkan kualitas BUMDes (Fatimah, 2018; Rahmatika, 2019; Firmansyah, 2023). Strategi pengembangan kualitas BUMDes melalui pendekatan dengan model *tetrapreneur* dapat untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dilapangan, perbaikan, serta solusinya (Rahmatika, 2019) dan (Firmansyah, 2023). Model *tetrapreneur* yang mengedepankan aspek berwirausaha, pemberdayaan, keberlanjutan, dan kemandirian, menjadi landasan untuk memperkuat peran BUMDes (Aspriani, 2023).

Tetrapreneur adalah terobosan inovasi Desa yang berbasis empat pilar wirausaha yaitu *Chainpreneur*, merupakan rantai pasokan bisnis mulai dari hulu ke hilir. *Marketpreneur* adalah sarana bertukarnya nilai produk. *Qualitypreneur* adalah kualitas produk melalui SDM yang berkualitas. *Brandpreneur* berupa merek produk yang dapat memperkuat posisi strategis dalam pasar ekonomi (Cavinato, 2002). Orientasi kewirausahaan dapat meningkatkan keberlanjutan (Farani, 2024). Kewirausahaan adalah bidang penelitian yang menantang dan telah menarik perhatian banyak peneliti, dan teori umumnya didasarkan pada penemuan dan eksploitasi peluang ekonomi melalui orientasi kewirausahaan (Runyan, 2008). Dikembangkannya model *tetrapreneur* difokuskan pada aspek berwirausaha, pemberdayaan, keberlanjutan dan kemandirian yang harus ditanamkan sebagai landasan bagi pengembangan BUMDes (Aspriani, 2023).

Chainpreneur atau yang disebut dengan rantai wirausaha merupakan suatu pendekatan untuk mendeskripsikan bagaimana rantai kewirausahaan itu berlangsung atau bagaimana suplai distribusi dari produk-produk yang dipasarkan yang terdiri dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Fatimah, 2018). Tujuan dengan adanya rantai pasokan diharapkan dapat memberikan nilai surplus dari setiap produk yang di distribusikan dipasaran.

Marketpreneur (pasar wirausaha) merupakan sebuah sudut pandang yang inovatif mengenai kondisi yang ada di pasar usaha terkait dengan kebutuhan para pengusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen secara keseluruhan. Untuk mempertahankan nilai profitabilitas, dalam berbisnis harus sadar bagaimana caranya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan

efisiensi beroperasi sehingga dapat menguasai pasar ekonomi yang bertanggung jawab baik kepada konsumen, investor, regulator maupun pemerintah (Ferrel, 2014).

Qualitypreneur (kualitas wirausaha) merupakan sebuah rekomendasi bagaimana seorang pengusaha mampu menghasilkan usaha yang berkualitas sehingga dapat bertahan dengan segala keadaan. Biasanya ukuran untuk menilai tingkat kualitas sebuah usaha dilihat dari karakteristik dan inovasi yang dimiliki wirausaha dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tersirat maupun tersurat (Sower, 2018). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amzalova (2020) dan Noor (2023) dimana peran jiwa kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keberhasilan BUMDes.

Brandpreneur (merek usaha) merupakan pendekatan berkaitan dengan nilai merek suatu produk yang ada di pasar ekonomi. *Benchmarking* adalah salah satu teknik wirausaha global yang terkenal untuk mendorong pertumbuhan usaha melalui pendekatan nilai merek sehingga dengan *brand*/merek yang dimiliki produk yang dihasilkan wirausaha dapat berkompetisi dengan produk yang lain dipasar ekonomi secara khas dan mampu mendapatkan posisi yang strategis di pasar dan mempertahankan siklus hidupnya (Kotler, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahiri (2020) yang menyatakan *brandpreneur* atau *brand image* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Pengembangan model *tetrapreneur* diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang terjadi pada BUMDes selama ini. Variabel dari 4 (empat) pilar *tetrapreneur* merupakan keterbaruan penelitian dan membedakannya dengan

penelitian terkait. Penerapan model *tetrapreneur* menjadi rekomendasi model dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2018) dimana model ini berhasil diterapkan di Desa Bleberan, Gunung Kidul sebagai salah satu model keberlanjutan dalam pengentasan kemiskinan tanpa meninggalkan kearifan lokal menuju ketahanan ekonomi dan kesejahteraan adaptif. Walaupun model *tetrapreneur* sudah mulai banyak diterapkan dalam penelitian, namun masih ada celah untuk menciptakan kebaruan (*novelty*) salah satunya dengan mengkombinasikannya dengan kearifan lokal atau aspek-aspek lain yang ada di lokasi penelitian seperti dukungan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan.

Selain model pengembangan melalui pilar-pilar ekonomi kreatif tersebut, dalam pengembangannya BUMDes juga perlu melakukan kerjasama atau mengadakan kemitraan dengan Perguruan Tinggi untuk melahirkan SDM yang unggul dan kuat dalam bidang akademik serta mampu menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam persaingan di dunia bisnis yang dapat menunjang keberlanjutan BUMDes. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fifiyanti dkk (2022) yang menyatakan dengan adanya kemitraan dari pihak terkait yang berkompeten berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha produksi kopi BUMDes Buana Mekar. Penelitian Kharis & Hasan (2020) yang menunjukkan perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki sumber daya ekonomi yang besar sehingga berpotensi untuk mendayagunakan kekuatan finansial mereka demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perguruan tinggi menjadi mediator dan fasilitator untuk membantu perusahaan dalam merancang dan membangun sistem kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan CSR guna mencapai keberlanjutan bisnis. Kerja sama Perusahaan dengan perguruan tinggi mampu

mengatasi kendala-kendala yang ada. Perusahaan yang lebih banyak berkolaborasi dengan universitas cenderung memiliki lebih banyak paten dan produk baru (Shi, 2020). Perusahaan mendapat manfaat dari kolaborasi dengan universitas, sehubungan dengan peningkatan kompetensi setelah mengatasi hambatan (Kafouros, 2015). Kerjasama dengan perguruan tinggi menyebabkan perusahaan memperoleh inovasi, paten, transfer pengetahuan, produk, layanan, dan proses baru, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberlanjutan bisnis (Jirapong, 2021).

Dengan diterapkannya model *tetrapreneur* serta adanya kontribusi kemitraan dari Perguruan Tinggi yang dimana dalam hal ini Perguruan Tinggi dinilai memiliki pikiran yang selalu *update* terkait perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan mampu melakukan kerjasama dalam rangka membimbing serta mengarahkan pelaku BUMDes untuk bisa berbenah diri dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan BUMDes dalam menunjang keberlangsungannya dapat berhasil dilaksanakan. Atas uraian fenomena dan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengangkat penelitian Tesis dengan judul **“Pengaruh Model *Tetrapreneur* Terhadap Keberlanjutan BUMDES Dengan Kemitraan Perguruan Tinggi Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Motivasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan keberlanjutan BUMDes. Secara lebih mengkhusus, motivasi dari penelitian ini yakni sebagai berikut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian desa. Berbagai

permasalahan seperti kasus kecurangan penggunaan dana BUMDes oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, kurangnya pemahaman pelaku terhadap cara pengelolaan BUMDes baik pengelolaan modal, pencatatan laporan keuangan, pemasaran produk, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa serta kurangnya kesadaran dari pihak terkait terhadap pengelolaan BUMDes menyebabkan tujuan pendirian BUMDes tidak tercapai dengan baik dan keberlanjutan BUMDes rendah. Permasalahan ini yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi keberlanjutan BUMDes yakni tetrapreneur, kemudian melibatkan kemitraan perguruan tinggi untuk memoderasi pengaruh tetrapreneur terhadap keberlanjutan BUMDes mengingat pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberdayakan badan usaha dan lembaga keuangan daerah melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga peneliti berharap melalui penelitian ini diperoleh jalan keluar untuk mengatasi permasalahan terkait keberlanjutan BUMDes, sehingga peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan perekonomian desa dapat terwujud dengan baik.

1.3 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi. Kasus penyelewengan banyak terjadi pada BUMDes di Kabupaten Buleleng dalam tiga tahun terakhir, dan terdapat 31 BUMDes di Kabupaten Buleleng yang bermasalah dimulai dari kasus kecurangan penggunaan dana BUMDes oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, kurangnya pemahaman pelaku terhadap cara pengelolaan BUMDes baik pengelolaan modal, pencatatan laporan keuangan, pemasaran

produk, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa serta kurangnya kesadaran dari pihak terkait terhadap pengelolaan BUMDes. Berbagai permasalahan ini menyebabkan keberlanjutan BUMDes di Kabupaten Buleleng rendah.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada persoalan yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *chainpreneur* berpengaruh terhadap keberlanjutan BUMDes ?
2. Apakah *marketpreneur* berpengaruh terhadap keberlanjutan BUMDes?
3. Apakah *qualitypreneur* berpengaruh terhadap keberlanjutan BUMDes?
4. Apakah *brandpreneur* berpengaruh terhadap keberlanjutan BUMDes?
5. Apakah kemitraan perguruan tinggi dapat memoderasi model *tetrapreneur* terhadap keberlanjutan BUMDes?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *chainpreneur* terhadap keberlanjutan BUMDes
2. Untuk mengetahui pengaruh *marketpreneur* terhadap keberlanjutan BUMDes
3. Untuk mengetahui pengaruh *qualitypreneur* terhadap keberlanjutan BUMDes
4. Untuk mengetahui pengaruh *brandpreneur* terhadap keberlanjutan BUMDes

5. Untuk mengetahui pengaruh model *tetrapreneur* terhadap keberlanjutan BUMDes yang dimoderasi oleh Kemitraan Perguruan Tinggi

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sumbangan ilmu serta ekonomi khususnya akuntansi publik dalam hal ini berkaitan dengan pengaruh model *tetrapreneur* terhadap keberlanjutan bumdes dengan kemitraan perguruan tinggi sebagai variabel moderasi.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan bidang ilmu akuntansi serta menjadi tambahan referensi khususnya akuntansi sektor publik.

- 2) Bagi pelaku BUMDes

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan model *tetrapreneur* sebagai hal yang baru agar keberlangsungan BUMDes dapat terjadi serta tujuan BUMDes dapat terlaksana.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hadi dari penelitian ini dapat memberikan manfaat tambahan ilmu serta informasi untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih baik lagi.